

DAFTAR INFORMASI PUBLIK DISBUN

22

**INFORMASI
SETIAP
SAAT**

19

**INFORMASI
BERKALA**

3

**INFORMASI
SERTA
MERTA**

20

**INFORMASI
DIKECUALI
KAN**



INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT									
NO	JENIS INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN/ PENERBIT INFORMASI	WAKTU PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA			RETENSI ARSIP	KODEFIKASI
					CETAK	REKAM	ONLINE		
1	Rencana Strategik	Rencana Strategik Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018	Sekretariat	2013	✓	✓	✓	selama berlaku	-
2	Revisi Rencana Strategik	Revisi Rencana Strategik Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018	Sekretariat	2018	✓	✓	✓	selama berlaku	-
3	Rancangan Akhir Rencana Strategik	Rancangan Akhir Rencana Strategik Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023	Sekretariat	2019	✓	✓	✓	selama berlaku	
4	Daftar Urut Kepangkatan	Informasi tentang kepegawaian Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur	Sekretariat	2019	✓	✓	✓	selama berlaku	-
5	Struktur Organisasi	Informasi tentang organisasi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur	Sekretariat	2019	✓	✓	✓	selama berlaku	-
6	Standar Pelayanan Publik Pemberian Advis Teknis Perijinan Usaha Perkebunan	Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur No. 188.4/001/Kpts-Disbun/2010 tentang Standar Pelayanan Publik Pemberian Advis teknis Perijinan Usaha Perkebunan	Bidang Usaha	2010	✓	✓	✓	selama berlaku	-
7	Standar Pelayanan Publik Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengawasan Benih Perkebunan tentang Pengawasan, Peredaran Benih, Pemeriksaan/ Pengujian Benih Perkebunan, Pemeriksaan, Pengujian Bibit Perkebunan	Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur No. 188.4/154/Kpts-Disbun/2010 tanggal 8 Juni 2010 tentang Standar Pelayanan Publik Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengawasan Benih Perkebunan tentang Pengawasan, Peredaran Benih, Pemeriksaan/ Pengujian Benih Perkebunan, Pemeriksaan, Pengujian Bibit Perkebunan	UPTD Pengawasan Benih Perkebunan	2010	✓	✓	✓	selama berlaku	-
8	Standar Pelayanan Publik Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan	Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur No. 188.4/153/Kpts-Disbun/2011 tanggal 11 Januari 2011 tentang Standar Pelayanan Publik Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan	UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan	2010	✓	✓	✓	selama berlaku	-



INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT									
NO	JENIS INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN/ PENERBIT INFORMASI	WAKTU PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA			RETENSI ARSIP	KODEFIKASI
					CETAK	REKAM	ONLINE		
9	Standar Pelayanan Publik Pendayagunaan Website Sebagai Sarana Penyampaian Data dan Informasi	Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur No. 188.4/007/Kpts-Disbun/2011 tanggal 11 Januari 2011	Sekretariat	2011	√	√	√	selama berlaku	-
10	Rencana Kerja Tahunan	Dokumen Perencanaan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur	Sekretariat	2019	√	√	√	selama berlaku	-
11	Pedoman Umum	Pedoman Umum Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur	Sekretariat	2019	√	√	√	selama berlaku	-
12	Pagu Anggaran	Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur	Sekretariat	2019	√	√	√	selama berlaku	-
13	Rencana Umum Pengadaan	Informasi tentang pengumuman pengadaan barang/jasa Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur	Sekretariat	2019	√	√	√	selama berlaku	-
14	Peraturan dan Kebijakan	Naskah Akademik Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan	Sekretariat	2015	√	√	√	selama berlaku	-
		Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan	Sekretariat	2018	√	√	√	selama berlaku	-
15	Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara	Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara lingkup Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur	Sekretariat	2017	√	√	√	selama berlaku	-
16	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama lingkup Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur	Sekretariat	2018	√	√	√	selama berlaku	-
17	Perjanjian Kinerja	Perjanjian Kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur	Sekretariat	2018	√	√	√	selama berlaku	-
18	Nota Kesepahaman	Nota Kesepahaman Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur	Sekretariat	2018	√	√	√	selama berlaku	-
19	Hasil Kajian dan Penelitian	Hasil Kajian dan Penelitian Sektor Perkebunan	Sekretariat	2017	√	√	√	selama berlaku	-
20	Rekapitulasi Surat Menyurat	Rekapitulasi Surat Menyurat	Sekretariat	2018	√	√	√	selama berlaku	-



INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT									
NO	JENIS INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN/ PENERBIT INFORMASI	WAKTU PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA			RETENSI ARSIP	KODEFIKASI
					CETAK	REKAM	ONLINE		
21	Syarat – Syarat Pengajuan Bantuan Untuk Pengembangan Komoditi Perkebunan Pola PIR Swadaya	Syarat – Syarat Pengajuan Bantuan Untuk Pengembangan Komoditi Perkebunan Pola PIR Swadaya	Bidang Pengembangan Komoditi	2018	√	√	√	selama berlaku	-
22	Daftar Produsen Benih Perkebunan	Daftar Prodisen benih Perkebunan di wilayah Kalimantan Timur	UPTD Pengawasan Benih Perkebunan	2017	√	√	√	selama berlaku	-



INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SECARA BERKALA									
NO	JENIS INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN/ PENERBIT INFORMASI	WAKTU PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA			RETENSI ARSIP	KODEFIKASI
					CETAK	REKAM	ONLINE		
1	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	Dokumen Kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur	Sekretariat	2018	√	√	√	selama berlaku	-
2	Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LPPD)	Laporan Kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur	Sekretariat	2018	√	√	√	selama berlaku	-
3	Laporan Tahunan Dinas	Laporan Kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur	Sekretariat	2018	√	√	√	selama berlaku	-
4	Laporan Data Statistik	Laporan Data dan Informasi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur	Sekretariat	2018	√	√	√	selama berlaku	-
5	Harga Satuan Standar Pokok Komoditi (HSPK)	Dokumen Harga Satuan Standar Pokok Komoditi	Sekretariat	2017	√	√	√	selama berlaku	-
6	Perkembangan Harga Komoditi	Informasi harga komoditi perkebunan	Bidang Usaha	2019	√	√	√	selama berlaku	-
7	Peta Sebaran Komoditi Perkebunan	Peta Sebaran Komoditi Perkebunan	Bidang Usaha	2018	√	√	√	selama berlaku	-
8	Realisasi Penyaluran Benih Kelapa Sawit	Informasi realisasi penyaluran benih kelapa sawit	Bidang Produksi	2018	√	√	√	selama berlaku	-
9	Data Sertifikasi Benih Perkebunan	Informasi sertifikasi benih perkebunan	UPTD PBP	2018	√	√	√	selama berlaku	-
10	Jumlah dan Kapasitas Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit	Informasi Jumlah dan Kapasitas Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit	Bidang Usaha	2018	√	√	√	selama berlaku	-
11	Inventarisasi Alat dan Mesin Perkebunan	Informasi Inventarisasi Alat dan Mesin Perkebunan	Bidang Produksi	2017	√	√	√	selama berlaku	-
12	Realisasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi	Informasi Realisasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi	Bidang Produksi	2016	√	√	√	selama berlaku	-
13	Data pengembangan Perkebunan Rakyat Melalui Pola PIR Swadaya dan Kemitraan	Data pengembangan Perkebunan Rakyat Melalui Pola PIR Swadaya dan Kemitraan	Bidang Pengembangan	2018	√	√	√	selama berlaku	-



INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SECARA BERKALA									
NO	JENIS INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN/ PENERBIT INFORMASI	WAKTU PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA			RETENSI ARSIP	KODEFIKASI
					CETAK	REKAM	ONLINE		
14	Daftar Aset	Informasi tentang aset Dinas Perkebunan Provinsi kalimantan Timur	Sekretariat	2016	√	√	√	selama berlaku	-
15	Data Rekapitulasi Perusahaan Perkebunan	Informasi tentang perusahaan perkebunan	Bidang Usaha	2018	√	√	√	selama berlaku	-
16	Laporan Serangan OPT Penting Tanaman Perkebunan	Informasi tentang serangan OPT penting tanaman perkebunan	Bidang Perlindungan	2018	√	√	√	selama berlaku	-
17	Laporan Keuangan	Informasi tentang realisasi keuangan dan fisik kegiatan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur	Sekretariat	2018	√	√	√	selama berlaku	-
18	Hasil Survey Tingkat Kepuasan Pengunjung Website	Hasil Survey Tingkat Kepuasan Pengunjung Website	Sekretariat	2018	√	√	√	selama berlaku	-
19	Laporan Pelayanan Informasi Publik	Laporan Pelayanan Informasi Publik	Sekretariat	2018	√	√	√	selama berlaku	-



INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SERTA MERTA									
NO	JENIS INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN/ PENERBIT INFORMASI	WAKTU PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA			RETENSI ARSIP	KODEFIKASI
					CETAK	REKAM	ONLINE		
1	Peta Potensi Serangan OPT Penting Tanaman Perkebunan	Informasi tentang sebaran serangan OPT penting tanaman perkebunan	Bidang Perlindungan	2017	√	√	√	selama berlaku	-
2	Informasi Perubahan Iklim	Informasi tentang perubahan iklim seperti potensi sebaran titik api, cuaca dan lainnya	Bidang Perlindungan	2017	√	√	√	selama berlaku	-
3	Informasi peredaran benih perkebunan palsu	Informasi peredaran benih perkebunan palsu	UPTD PBP	2018	√	√	√	selama berlaku	-



No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Pertimbangan Sebelumnya		
			Dibuka	Ditutup	
A.	Kepegawaian				
1	Daftar riwayat hidup pegawai, Kartu Permohonan Penghasilan Pegawai (KP4), hasil <i>general check up</i> kesehatan pegawai/ pejabat, hasil evaluasi kapabilitas / intelektual / kompetensi / rekomendasi pegawai, rekomendasi tim Etika, biodata elektronik PNS (<i>database</i>), identitas PNS yang izin perkawinan/perceraian, riwayat dan kondisi anggota keluarga pejabat / pegawai	1). Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2). UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.		Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pejabat/ pegawai	Pegawai yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis, dan/ atau pengungkapan seseorang dalam jabatan publik
2	Sasaran Kerja Pegawai (SKP)	1). Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2). UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 3). Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Negeri Sipil 4). Peraturan Kepala BKN No 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil 5). PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS		Apabila dibuka dan diberikan dapat mengungkapkan rahasia pribadi	Pegawai yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis, dan/ atau pengungkapan seseorang dalam jabatan publik



No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Pertimbangan Sebelumnya		
			Dibuka	Ditutup	
B.	Hukum				
1	Alat bukti kasus, dokumen penanganan perkara, opini hukum pendapat hukum/ legal opinion, catatan mengenai proses penyelesaian sengketa, kasus hukum yang masih dalam proses	1). Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2). UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 3). UU No 5 Tahun 1986 Jo UU No 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara 4). UU No 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman		Apabila dibuka dan diberikan dapat menghambat penegakan hukum	Sampai dengan proses selesai dan mempunyai kekuatan hukum tetap
C.	Hak Kekayaan Intelektual				
1	Kepentingan Perlindungan Varietas Tanaman	1). Pasal 17 huruf b UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2). UU No 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman		Akan berpengaruh pada nilai ekonomis karena berguna dalam kegiatan usaha	Sampai jangka waktu perlindungan habis
2	Dokumen Permohonan Hak PVT (kerahasiaan varietas dan seluruh dokumen permohonan PVT)	1). Pasal 17 huruf b No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2). UU No 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman		Dapat mengakibatkan persaingan yang tidak sehat dan kerugian materiil	Sampai dengan diumumkannya permohonan Hak PVT di papan pengumuman



No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Pertimbangan Sebelumnya		
			Dibuka	Ditutup	
C.	Pengadaan Barang/Jasa				
1	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	1). Pasal 17 huruf i UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2). Pasal 6 huruf b Perpres No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya		Menimbulkan penilaian yang tidak obyektif, menghambat kebijakan karena adanya pengungkapan prematur, menimbulkan persaingan tidak sehat dalam proses pengadaan barang / jasa	Pengadaan barang dan jasa selesai
2	Dokumen Kontrak	1). Pasal 17 huruf i dan j UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2). Pasal 23 UU No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 3). Pasal 6 huruf b Perpres No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya		Muncul persaingan yang tidak sehat	Sampai dengan proses selesai
3	Dokumen Penawaran Penyedia Barang/Jasa	1). Pasal 17 huruf j UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2). Pasal 6 huruf b Perpres No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya		Apabila dibuka dan diberikan dapat mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Sampai dengan proses selesai





4	Dokumen pendukung pengadaan barang / jasa, termasuk Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (<i>Aanwijzing</i>), evaluasi penawaran / kualifikasi / hasil lelang	1). Pasal 17 huruf j UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2). Pasal 6 huruf b Perpres No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya		Apabila dibuka dan diberikan dapat mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Sampai dengan proses selesai
5	Proses penyelesaian pengadaan barang/ jasa, termasuk penyelesaian sanggah / sanggah banding	1). Pasal 17 huruf j UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2). Pasal 6 huruf b Perpres No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya		Apabila dibuka dan diberikan dapat mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Sampai dengan proses selesai
D. Pengelolaan Keuangan					
1	Data pendukung hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan (contoh : kuitansi, SPP, SPM dan SP2D)	1). Pasal 17 huruf j UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2) Pasal 1 angka 28, Pasal 40 UU No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan UU No 10 tahun 1998		Informasi terkait dengan identitas rekening orang/ badan	2 tahun atau setelah dokumen informasi menjadi laporan keuangan yang audited
2	Hasil pemeriksaan reguler oleh Itjen (LHP)	1). Pasal 17 huruf a dan huruf i UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2). Peraturan Menpan No PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Pengawas		Penyalahgunaan oleh pihak lain	2 tahun atau setelah dokumen informasi menjadi laporan keuangan yang audited



4	Dokumen pendukung pengadaan barang / jasa, termasuk Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (<i>Aanwijzing</i>), evaluasi penawaran / kualifikasi / hasil lelang	1). Pasal 17 huruf j UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2). Pasal 6 huruf b Perpres No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya		Apabila dibuka dan diberikan dapat mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Sampai dengan proses selesai
5	Proses penyelesaian pengadaan barang/ jasa, termasuk penyelesaian sanggah / sanggah banding	1). Pasal 17 huruf j UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2). Pasal 6 huruf b Perpres No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya		Apabila dibuka dan diberikan dapat mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Sampai dengan proses selesai
D. Pengelolaan Keuangan					
1	Data pendukung hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan (contoh : kuitansi, SPP, SPM dan SP2D)	1). Pasal 17 huruf j UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2) Pasal 1 angka 28, Pasal 40 UU No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan UU No 10 tahun 1998		Informasi terkait dengan identitas rekening orang/ badan	2 tahun atau setelah dokumen informasi menjadi laporan keuangan yang audited
2	Hasil pemeriksaan reguler oleh Itjen (LHP)	1). Pasal 17 huruf a dan huruf i UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2). Peraturan Menpan No PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Pengawas		Penyalahgunaan oleh pihak lain	2 tahun atau setelah dokumen informasi menjadi laporan keuangan yang audited



		Pengecualian Informasi	Pertimbangan Sebelumnya		
			Dibuka	Ditutup	
E.	Lain - lain				
1	Sistem Management Database	1). Pasal 17 huruf j UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2). Pasal 30 UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik		Penyalahgunaan oleh pihak lain.	Terbatas
2	Kode Akses Elektronik	1). Pasal 17 huruf j UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2). Pasal 30 UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik		Penyalahgunaan oleh pihak lain	Terbatas
3	Dokumen Pengajuan Bantuan Untuk Pengembangan Komoditi Perkebunan Pola PIR Swadaya	Pasal 17 huruf b UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Dapat menimbulkan persaingan tidak sehat	Terbatas
4	Usulan Pelepasan Varietas Baru	1). Pasal 17 huruf b UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2). Permentan No 40 Tahun 2017		Dapat diperjualbelikan terhadap varietas yang akan dilepas, kemungkinan bisa dilepas pihak lain / negara lain	Setelah varietas dilepas



TERIMA KASIH



<http://disbun.kaltimprov.go.id/>



**DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Jl. MT. Haryono Samarinda 75125

Email : admin@disbun.kaltimprov.go.id

FOLLOW US



@disbunkaltim



Dinas Perkebunan Kalimantan Timur



@disbunkaltim

TELP : (0541) 736852 , (0541) 748660

FAX : (0541) 748382

